

BAB III

PENYAJIAN DATA

3.1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati.

Dalam Bab III berisi mengenai penyajian data ini, peneliti memaparkan hasil penelitian secara kualitatif berdasarkan kajian pustaka, observasi, dan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa informan dengan menguraikan data-data hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan dari lapangan. Penelitian ini dilakukan atas dasar tujuan dari penelitian, yaitu: 1) mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2013 tentang pemberdayaan UMKM di kecamatan Gunung Pati; dan 2) mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati.

Data penelitian yang disajikan berupa data primer hasil penelitian beserta analisis terhadap data tersebut. Data primer merupakan data yang telah dihimpun oleh peneliti di lapangan melalui metode wawancara mendalam dengan bantuan *interview guide* kepada informan, dan observasi melalui kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian yang disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan. Informan yang diwawancarai dalam penelitian merupakan informan yang dinilai berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Berikut daftar informan yang peneliti wawancara mengenai permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian tersebut disajikan pada bagian di bawah ini.

Tabel 3.1
Informan Wawancara

NO	NAMA	KETERANGAN	KODE
1	Ibu Dra Litani Satyawati	Sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang	I-01
2	Bpk Drs. Nugroho Suprijanto, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	I-02
3	Bpk. Bejo, SE	Kepala seksi Bina Usaha Koperasi Dinas dan Usaha Mikro Kota Semarang	I-03
4	Ibu Syafrani	Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	I-04
5	Bpk. Baharuddin	Warga anggota UMKM Kecamatan Gunung Pati	I-05
6	Ibu Sandra	Warga anggota UMKM Kecamatan Gunung Pati	I-06

3.1.1 Peningkatan Daya Saing

Peningkatan daya saing berkaitan dengan sejauh mana UMKM Kecamatan Gunung pati mampu menghadapi persaingan usaha dengan pelaku usaha lainnya. Daya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan pangsa pasar. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh faktor suplai yang tepat waktu dan harga yang kompetitif. Secara berjenjang, suplai tepat waktu dan harga yang kompetitif dipengaruhi oleh dua faktor penting lainnya, yaitu fleksibilitas (kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap keinginan konsumen) dan manajemen differensiasi produk.

Pengembangan daya saing khususnya Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor kecil. Keberhasilan industri untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Pengembangan sumber daya manusia bagi pelaku UMKM sangat penting salah satunya dengan Pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan dimana pemerintah setempat memberikan bantuan berupa pengetahuan dan keterampilan berwirausaha kepada pelaku usaha dalam mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan usahanya, Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak. Nugroho (Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang) , berikut ini:

“Untuk menambah ketrampilan dan pengetahuan para pengusaha kecil, kami memberikan pelatihan teknis dan manajemen, pelatihan teknis berupa pelatihan produksi termasuk sarana prasarana dan pelatihan manajemen berupa pelatihan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat menunjang usaha mereka”(Wawancara dengan I-02 pada 7 April 2017).

Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koprasi dan UMKM bertujuan untuk meningkatkan daya saing dipasaran sebagaimana yang di ungkapkan lagi oleh Ibu Syafrani (Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang) bahwasanya:

“Pelatihan bagi usaha kecil harus terus dilakukan, karena dengan pelatihan, hasil produksi akan lebih baik dan meningkat. Apabila hasil produksinya sudah bagus maka selanjutnya akan menaikkan harga jual dari produk tersebut dan tentu apabila ini dijaga dengan baik masyarakat Kecamatan Gunung Pati akan mudah untuk membuka peluang kerja dan mendapatkan pekerjaan.. ...Contohnya di batik dan makanan seperti bandeng presto yang telah berjalan sekarang, pemasaran usaha dibidang batik untuk lingkup cukup baik, bersaing dalam negeri atau luar negeri masih sangat mungkin karena ciri khas yang tetap dijaga dan kualitas yang semakin baik. Tentu semua itu tidak terlepas dari Skill Training And Company Management” (Wawancara dengan I-04 pada 7 April 2017).

Pernyataan tersebut dalam pengembangan daya saing UMKM dan sumber daya manusia melalui pelatihan, juga ada penyuluhan yang berguna untuk menambah wawasan sumber daya manusia terkait pengembangan UMKM. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koprasi dan UMKM Kota Semarang bertujuan untuk menciptakan suatu produk unggulan dan meningkatkan daya saing bagi hasil produksi UKM yang terdapat di daerah lain. Industri yang terdapat di Kecamatan Gunung Pati bertumpu pada penggunaan bahan baku lokal/pengolahan sumber daya alam hal tersebut tidak terlepas dari skill yang dimiliki oleh para pelaku.

3.1.1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melihat sejauh mana pemerintah daerah Kota Semarang berupaya meningkatkan kemampuan SDM pelaku usaha UMKM agar bisa bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Menurut Informan Bapak Nugroho terkait dengan sumber daya manusia pelaku usaha UMKM di Kecamatan Gunung Pati sebagai berikut:

“Kualitas SDM yang belum sepenuhnya memiliki skill atau keterampilan yang diperlukan sehingga kualitas produk yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal seperti pemanfaatan bahan baku mengingat bahan baku yang melimpah. Namun demikian kemampuan SDM dalam ahli teknologi dan kreatifitas masih relatif rendah ini akan berdampak kepada perkembangan industri kreatif yang cenderung lamban” (Wawancara dengan I-02 pada 7 April 2017).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa kemampuan pelaku usaha di Kecamatan Gunung Pati masih relatif rendah. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam usaha pemberdayaan UMKM. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan tujuan agar pelaku usaha UMKM bisa menghasilkan produk yang mampu bersaing baik secara lokal dan nasional. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Bejo sebagai berikut.

“Peningkatan kreatifitas SDM untuk menghasilkan produk sesuai dengan permintaan pasar sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar global

atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha kecil menengah di Kecamatan Gunung Pati adalah karena kurangnya ketrampilan sumber daya manusia serta manajemen yang ada relatif masih tradisional” (Wawancara dengan I-03 pada 7 April 2017).

Dalam upaya peningkatan SDM salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan memperkuat pengetahuan para pelaku usaha melalui pelatihan dan sosialisasi. Peningkatan SDM pelaku usaha UMKM di Kecamatan Gunung Pati merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas UMKM dan Perindag Kota Semarang dalam memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki para pelaku UMKM Kecamatan Gunung Pati. Hal ini dilakukan agar para pelaku dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan melalui Pendekatan Penguatan harus dapat menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Hal ini dijelaskan Ibu Syafrani selaku informan penelitian sebagai berikut.

“Makna dari memperkuat pengetahuan ini sangat erat kaitannya dengan proses memberikan sebuah pendidikan agar para pelaku UMKM dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan dapat memenuhi kebutuhannya. Memperkuat pengetahuan tersebut dapat berupa program-program pendidikan seminar, pertukaran informasi, dan proses kegiatan belajar yang berkaitan dengan peningkatan daya saing sebuah produk. Pemberdayaan UMKM Kecamatan Gunung Pati dalam memperkuat

pengetahuan telah dilakukan berupa seminar pengetahuan standar mutu produk dan persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Namun keterbatasan anggaran yang membuat kuota peserta terbatas, sehingga hal ini belum bisa dilakukan secara merata terhadap seluruh pelaku”. (Wawancara dengan I-04 pada 7 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM Kecamatan Gunung Pati yaitu Bapak Baharuddin dan Ibu Sandra yang pernah mengikuti kegiatan pemberdayaan, diperoleh sebuah fakta bahwa kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kecamatan Gunung Pati tersebut sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM sangat merasakan manfaat dari hasil beberapa kegiatan yang dilakukan dinas selama ini. Manfaat tersebut adalah bekal ilmu pengetahuan bagi para pelaku UMKM sebagai *owner* dan para karyawannya. Selain itu, manfaat itupun menjadi wawasan bagi para pelaku untuk dapat berkomunikasi memberikan sebuah penjelasan kepada para konsumen dalam menjawab pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh konsumen. Sehingga penguatan pengetahuan ini berdampak positif bagi para pelaku untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan dalam dirinya berupa pengetahuan yang bermanfaat. Dengan pengetahuan yang bermanfaat tersebut maka beberapa permasalahan seperti kinerja karyawan, inovasi standar mutu kaos, maupun memberikan penjelasan kepada konsumen yang baik dan benar akan semakin baik. Sehingga meningkatkan keberdayaan para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Gunung Pati.

3.1.2. Peningkatan Pelaksanaan

Kewirausahaan menunjuk pada semangat, sikap dan perilaku sebagai teladan dalam keberanian mengambil resiko yang telah diperhitungkan berdasar atas kemauan dan kemampuan sendiri. Orang yang memiliki sikap demikian disebut sebagai wiraswasta atau wirausaha. Oleh

sebab itu, seorang wiraswasta adalah seorang pejuang yang gagah, luhur, berani dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Wirausaha adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat kewirausahaan: berani mengambil resiko, keutamaan, kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.

Ketepatan pelaksanaan melihat apakah pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati sudah melibatkan aktor yang kompeten dan tepat untuk mendukung keberhasilan implementasi tersebut. Ketepatan pelaksanaan disini melihat dua indikator yaitu ketepatan lembaga pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM dan ketepatan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di Gunung Pati. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Litani Sebagai kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang terkait dengan ketepatan pelaksanaan adalah sebagai berikut :

“Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM antara lain dinas koperasi dan usaha mikro dan tentunya para pelaku usaha umkm yanag menjalankan usahanya di Kecamatan Gunung Pati.” (Wawancara dengan I-01 pada 7 April 2017).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bpk. Nugroho selaku Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang memperjelas peran masing-masing aktor dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati.

“Dalam pemberdayaan UMKM ada namanya Lembaga-lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada sudah terbukti cukup mampu melayani kebutuhan permodalan pelaku UMKM. Selain itu pemberdayaan UMKM tidak bisa lepas dari peran DPRD dan Pemerintah Kota

Semarang melalui SKPD terkait yakni BAPPEDA, Dinas Koperasi dan UKM, kepala desa, kepala kecamatan.” (Wawancara dengan I-02 Pada 7 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam implementasi peraturan daerah kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati telah melibatkan aktor yang tepat diantaranya Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, kepala desa, kepala kecamatan, dan LKM sebagai lembaga yang memberikan pinjaman modal bagi pihak UMKM.

Dengan adanya hal ini, Dinas Koperasi dan UKM dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM lebih mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi, tujuan kebutuhan, dan permasalahan yang ditemui melibatkan aktor-aktor tingkat bawah. Jaring aspirasi masyarakat dilakukan melalui forum musrenbang. Hasil dari forum musrenbang tersebut akan dibawa ke forum SKPD untuk diklarifikasi dan disinkronisasikan bersama SKPD terkait agar sesuai dengan tupoksi yang ada. Setelah dari forum SKPD, kemudian hasilnya akan dibawa ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut lagi dan disahkan. Hasil dari formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM, tertuang di dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kecamatan Gunung Pati.

3.1.3. Peningkatan Target

Peningkatan target merupakan salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan implementasi perda Pemberdayaan UMKMd di Kecamatan Gunung Pati. Dalam aspek ketepatan target dapat dilihat kesesuaian target yang telah direncanakan oleh implementor dan melihat apakah target-target yang ada telah menerima dampak positif dari kebijakan yang telah

dibuat. Ketepatan target dilihat dari beberapa indikator yaitu ketepatan sasaran kebijakan penataan ruang terbuka hijau, juga untuk mengetahui ada atau tidaknya tumpang tindih kebijakan dengan program atau kebijakan lain yang serupa, kemudian melihat apakah kebijakan tersebut termasuk dalam kebijakan baru atau memperbaharui. Berikut hasil wawancara yang didapat dari informan di lapangan:

“Untuk target sendiri semua pelaku usaha kecil di Kecamatan Gunung Pati ini mendukung dengan adanya upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan untuk membangun usaha kecil di daerah ini. Target kami dalam pemberdayaan UMKM adalah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha agar bisa bersaing dengan UMKM lain jika ada permasalahan kami sebagai dinas koperasi dan Usaha Kecil siap untuk membantu”
(Wawancara dengan I-03 pada 7 April 2017)

Selain target dari pemberdayaan UMKM ini adalah pengusaha kecil itu sendiri. Dalam proses pemberdayaan UMKM di kecamatan Gunung Pati tidak bisa lepas dari peranan masyarakat itu sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Bpk. Bejo selaku Kepala seksi Bina Usaha Koperasi Dinas dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut

“masyarakat termasuk di dalamnya pelaku UMKM memiliki peran dalam hal memberikan informasi tentang apa yang menjadi permasalahan yang ada di lapangan. Di sini peran masyarakat sangat besar dalam hal memberikan gambaran dan kejelasan mengenai permasalahan yang ada di lapangan termasuk permasalahan dalam hal pemberdayaan UMKM. Masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan. Sukses tidaknya partisipasi masyarakat tergantung dari seberapa jauh

keterlibatan untuk ikut serta dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan UMKM..

(Wawancara dengan I-03 pada 7 April 2017)

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa implementasi Perda kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati telah tepat sasaran hal ini ditunjukkan dengan respon masyarakat yang variatif terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kemudian tidak adanya tumpang tindih kebijakan dengan program atau kebijakan lain yang serupa dikarenakan perda tersebut sudah disahkan dengan memperbaharui kebijakan sebelumnya serta mengingat regulasi lain sebagai penguat kebijakan tersebut sehingga antar program dan kebijakan tersebut saling mendukung dan melengkapi.

3.2.Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Implementasi Kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati.

3.2.1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur agar tujuan dapat terwujud. Jika standar dan tujuan kebijakan tidak jelas, maka tidak bisa terjadi multi interpretasi, dan mudah menimbulkan kesalahpahaman serta konflik di antara aktor pelaksana kebijakan.

Dalam ukuran dan tujuan kebijakan melihat apakah tujuan dari penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen kemudian sejauh mana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut telah direalisasikan. Berikut wawancara dengan Ibu Litani :

“Tujuannya dari pemberdayaan UMKM adalah mendorong pelaku usaha agar mampu berdaya saing dan mengembangkan produknya menjadi lebih baik. Makanya dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan khususnya dalam pengembangan ragam produk, kami menyarankan agar para pengusaha melakukan perubahan dan penambahan ragam produknya agar lebih berkembang lagi” ((Wawancara dengan I-01 Pada 27 Desember 2017)

Selain itu dalam pemberdayaan UMKM juga bertujuan untuk menjaga kualitas produk pelaku usaha agar selalu menjadi lebih baik dan terjaga. Untuk peningkatan kualitas produk Dinas Koprasi dan UMKM memberikan masukan kepada pengusaha kecil tentang cara pemilihan bahan baku dan pemrosesan yang baik dan benar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Litani :

“Hal ini dikarenakan terkadang para pengusaha mengabaikan kualitas bahan, karena harga yang lebih mahal dan juga pemrosesan yang memerlukan waktu dan perhatian lebih. Pada akhirnya berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan kurang diterima masyarakat” (Wawancara dengan I-01 pada 27 Desember 2017)

Dinas Koprasi dan UMKM memberikan contoh bahan baku yang bermutu baik dan cara pemrosesan, sehingga bahan baku menjadi lebih berkualitas, yakni dengan menggunakan bahan baku yang tidak cacat.

3.2.2. Sumber daya

Sumberdaya merupakan variabel yang penting dalam pelaksanaan kebijakan karena keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia yang merupakan sumberdaya terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi harus memahami benar apa yang diterapkan dan apa yang dilakukan dalam kebijakan Dinas Koprasi dan UMKM sebagai penggerak dan pelindung UMKM di Kecamatan Gunungpati dapat berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah lain baik nasional maupun internasional Dinas Koprasi dan UMKM memberikan berbagai strategi seperti pelatihanpelatihan guna menambah keterampilan dan wawasan sehingga pelaku UMKM di Kecamatan Gunungpati dapat bekembang dan dapat memberikan predikat khusus bagi tiap-tiap daerah. Akan tetapi dalam melakukan pengembangan UMKM yang berada di Kecamatan Gunungpatimasih mengalami berbagai hambatan diantaranya ialah:

1. Terbatasnya staff dalam mendata unit usaha dan sarana pendukungnya, sehingga pendataan sebagai dasar untuk memberikan pembinaan dapat belum menjangkau lebih luas pada pengusaha kecil yang jumlahnya sangat besar dan tersebar diberbagai pelosok desa
2. Tingkat kewirausahaan para pengrajin pada umumnya masih rendah, lemahnya permodalan, peralatan tradisional sehingga memberi hasil produksi yang kurang dapat bersaing dan factor kualitas banyak diabaikan
3. Masih kurangnya pengetahuan dalam pemasaran produk dan saluran pemasaran belum dapat dimanfaatkan dengan baik sementara itu koperasi atau wadah persatuan pengrajin yang lain belum berfungsi sebagaimana mestinya

Selain itu adapun keluhan yang sering diungkapkan oleh para pelaku UKM juga disampaikan oleh Ibu Syafrani (Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang) sebagai berikut:

“Permasalahan dan kendala yang sering menjadi keluhan para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya yaitu modal dan pemasaran. Kami (PLUT) dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM untuk modal kami memberikan informasi tentang peminjaman modal kepada bank yang ada di daerah, dan untuk pemasaran kami menyediakan pasar lelang, promosi produk unggulan dan kerjasama dengan berbagai instansi” (Wawancara dengan I-04 pada 27 Desember 2017)

3.2.3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM tidak akan berjalan secara efektif jika faktor komunikasi yang ada diantara aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan tidak berjalan lancar yang mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para aktor. Sehingga proses penyampaian informasi sangatlah penting. Dalam variabel komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas terdapat beberapa unsur yang dilihat seperti bagaimana proses penyampaian informasi atau sosialisasi mengenai upaya mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada, kemudian terkait dengan materi apa yang diberikan pada saat sosialisasi. Salah bentuk dari komunikasi adalah pembentukan jaringan sosial antara pelaku usaha.

Pemilik usaha UMKM di Kecamatan Gunung Pati memiliki banyak jaringan yang ada dibelakangnya. Dengan maksud mereka memiliki hubungan yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang panjang, sehingga secara tidak langsung jaringan tersebut terjadi dan terikat.

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti Bapak Baharuddin menjelaskannya sebagai berikut :

“Usaha yang ditekuni oleh bpk. Baharuddin sejak tahun 2000-an silam. Dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik, beliau mengatakan jika usahanya tetap bertahan karna adanya usaha dan tekad. Meskipun beliau mengakui bahwa banyak kendala untuk mempertahankan usaha, akan tetapi beliau tidak mau kalah dalam kemajuan tekhnologi pada saat itu. Dulu masih belum ada HP yang bagus mbak, belum ada Internet yang tersebar, belum ada kurir. Dan dulu saya tetep tekun dan yakin jika saya bisa mengenalkan produk saya ke berbagai tempat. Saya sekarang memiliki karyawan sebanyak 40 orang. Kebanyakan dari mereka melakukan pekerjaannya dirumah (Dual Proyek), mereka memilik dikerjakan dirumah karena mereka juga menyambi dengan yang lainnya. Dan hal ini sudah dianggap lumrah oleh sebagian pemilik usaha. Selain pegawai, saya juga memiliki pelanggan tetap dari beberapa toko yang ada di Surabaya, kebanyakan mereka adalah para penjual sandal grosiran mbak. Alhamdulillah produk saya dianggap bagus dan layak untuk dijual kembali, sehingga saya tidak perlu lagi susah payah untuk mempromosikan produk saya. Kini saya lagi fokus ke pesanan dari luar kota mbak, karena kebetulan pemerintah kota Semarang sudah beberapa kali mengadakan bazar yang dikunjungi oleh orang-orang penting. Sehingga pada saat itu produk saya dikenal oleh sebagian orang dan mereka datang kembali untuk mememesannya. Saat peneliti menanyakan bagaimana kendala yang sedang bapak alami sekarang ? pak Baharuddin menjawab jika kendala saat ini mungkin pada modal mbak, karena bahan baku sekarang lagi tinggi harganya. Hal ini dilakukan oleh pak Baharuddin agar usahanya tetap berjalan dan masih bisa membiayai beberapa

karyawan tetap yang sudah setia dengan bapak.” (Wawancara dengan I-05 pada 17 September 2017)

Dalam menjalankan usaha dan memanfaatkan jaringan sosial pengusaha UMKM tidak jarang juga mengalami permasalahan dan kerugian bagi pihak pengusaha. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Sandra sebagai berikut.

“Beliau pun menjawab, ya pasti pernah mbak. Dulu waktu saya masih suka promosi ke beberapa kota di Semarang, saya pernah ditipu oleh rekan saya sendiri, padahal dia sudah berulang-ulang memesan produk di tempat saya. Tidak tahu kenapa dulu saat dia pesan 25 kodi, dan beliau janji untuk memberikan uang DP dimuka. Saat sudah memberikan DP dia hendak membawa produk sandal tanpa melunasi terlebih dahulu, karena dirasa sudah langganan, maka oleh pak Baharuddin dibiarkan. Setelah seminggu berlalu, pak Baharuddin mencoba untuk menghubungi dan mengingatkan agar segera melunasi biaya yang masih tertahan. Akan tetapi tetap tidak bisa dihubungi, dan pada saat itu pak Baharuddin nekat menyusul ke alamat yang diketahui berada di kota Solo. Sesampainya disana ternyata alamat yang diberikan jauh berbeda dengan lokasinya. Dimana disitu ternyata hanya rumah kost, bukan pemilik dari yang sebelumnya diberitahukan. Dari kasus itu, pak Baharuddin merasa tertipu dan rugi, mulai saat itu pak Baharuddin enggan memberikan komitmen kerja kepada siapa saja yang dirasa masih baru baginya.”(Wawancara dengan I-05 pada 17 September 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan modal sosial selalu berupa kerja sama, baik dalam pengertian kompetisi maupun saling membantu, antar-pelakunya, dengan beragam

motif, baik itu mengenai profit, status, harga diri, dan preferensi. Kerja sama tersebut membutuhkan kepercayaan yang dalam ekonomi modern dapat digantikan dengan mekanisme formal untuk mencegah kecurangan atau penipuan.

Jaringan sosial yang merupakan bentuk dari komunikasi dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati dimanfaatkan sebagai cara pelaku usaha mendapatkan modal usaha. Keanggotaan dalam jaringan hubungan keluarga dapat memberikan sumber modal ekonomi baik uang maupun modal ekonomi yang lain. Namun demikian, ada batas-batas tertentu dimana hubungan keluarga bisa menjadi sumber untuk mendapatkan modal ekonomi. Modal ekonomi yang bisa diperoleh melalui hubungan-hubungan keluarga berupa pinjaman modal, warisan, pemberian bagian pekerjaan sub-kontrak dan penggunaan fasilitas bersama. Berikut ini beberapa penuturan informan penelitian terkait dengan pemodalannya.

”Kebutuhan modal dalam menjalankan usaha ini pertama dari suami untuk mencukupinya saya meminjam Bank/pabrik sepatu dan koperasi simpan pinjam,

Kebutuhan modal pertama dari keluarga seperti orangtua untuk mencukupinya meminjam ke pihak Bank atau koperasi. Terkadang saya meminjam modal dari teman yang juga memiliki usaha.

Kebutuhan modal pertama dari warisan suami saya karena suami telah meninggal, untuk mencukupinya meminjam tetangga karena modalnya hanya sedikit” (Wawancara dengan I-06 pada 17 September 2017)

Data hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pinjaman dari pihak keluarga berupa modal uang biasanya hanya dalam jumlah yang kecil. Untuk pinjaman dalam jumlah yang besar biasanya pengusaha pinjam pada bank atau koperasi. Pinjaman lewat hubungan biasanya

dilakukan oleh seorang pengusaha pada pengusaha lain yang hubungannya sangat dekat misalnya kakak-adik atau orang tua-anak.

Modal usaha juga didapatkan dari warisan yang merupakan salah jalan bagaimana pengusaha bisa mendapatkan modal usaha. Sebagaimana pengusaha yang masih muda biasanya mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa unit usaha. Orang tua tersebut sudah lanjut usia kemudian mengurangi kegiatan usahanya dan memberikan sebagian usaha dan modalnya kepada anak-anaknya. Untuk penambahan modal yang cukup besar, pengusaha UMKM di Kecamatan Gunung Pati memanfaatkan koperasi dan pinjaman dari bank. Berikut ini adalah tuturan dari informan.

” Saya meminjam koperasi yang dipelopori dari paguyuban atau mungkin meminjam dari BANK dengan nominal kalau sudah puluhan Juta.” (Wawancara dengan I-06 pada 17 September 2017)

3.2.4. Disposisi Implementor

Disposisi implementor melihat bagaimana pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh pimpinan program dalam proses implementasi Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati serta melihat apakah tindakan atau sikap pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan rencana kebijakan yang telah dibuat. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai informan :

“Ya pendelegasian wewenang dalam implementasi pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung Pati ini sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya sehingga implementasi

kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik dan tidak ada ketidakjelasan tupoksi, tidak ada tumpang tindih tupoksi gitu.”(Wawancara dengan I-01 Pada 7 April 2017)

Terkait dengan kesesuaian sikap pelaksana kebijakan dengan rencana kebijakan yang telah dibuat dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

“ Ya tentu saja sadah mbak.. kita tetep mengacu pada rencana awal sebagai pedoman kita melaksanakan kebijakan supaya meminimalisir terjadinya kegagalan dalam implementasi. Kami juga antusias, bersungguh-sungguh dengan memaksimalkan apa yang kita punya, sumberdaya, dan lain sebagainya , supaya mendapat hasil akhir yang memuaskan dan kami lihat tidak ada satupun dinas yang menolak kebijakan ini, justru mendukung semua, kan juga keberhasilan kebijakan ini untuk kesejahteraan kita semua mbak.” (Wawancara dengan I-01 Pada 7 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai informan diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor sangat penting bagi keberhasilan implementasi karena terkait dengan antusiasme implementor dalam menanggapi kebijakan tersebut.

3.2.5. Kondisi Lingkungan, Ekonomi, sosial dan Politik

Kondisi lingkungan yang kondusif menjadi hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam variabel kondisi lingkungan ini melihat apakah ada dukungan dari elite politik terhadap kebijakan ini, kemudian apakah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Gunung Pati berpengaruh dalam pemberdayaan UMKM, lalu Apakah dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya kebijakan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Gunung

Pati, serta saran masyarakat terhadap pelaksanaan hal tersebut. berikut hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai informan :

Masalah permodalan merupakan masalah yang mendasar bagi pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Dalam pendidikan dan pelatihan dijelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan pinjaman modal dan prosedur yang harus dilakukan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Bejo sebagai berikut:

“Masalah utama yang banyak dihadapi oleh industri kecil adalah masalah mengakses modal, sehingga kami (Dinas) memberikan pelatihan manajemen permodalan yaitu berupa cara untuk mengakses kredit ke dinas, bank, ataupun lembaga keuangan lainnya” (Wawancara dengan I-03 Pada 7 April 2017)

Pernyataan yang disampaikan oleh Dinas UMKM menunjukkan pelaku usaha yang tersebar hampir ke pelosok desa adalah bagaimana cara mengakses permodalan sehingga Dinas UMKM hanya mampu memberikan cara untuk menambah modal seperti pengajuan kredit ke dinas, bank ataupun lembaga lain yang kiranya dapat memberikan akses permodalan hal ini menjadi lambanya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambanya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah mengingat faktor modal menjadi salah satu penyebab tidak munculnya usaha-usaha baru diluar sektor esktratif.

Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UKM pemecahan dalam aspek modal penting dan memang harus dilakukan Selain pengetahuan dalam memperoleh modal, pengusaha kecil juga diberikan ketrampilan dalam mengelola keuangan. Hal ini terungkap dalam petikan wawancara dengan pengusaha Ibu Syafrani sebagai berikut :

“Saya pernah mengikuti pelatihan manajemen yang diberikan oleh dinas berupa pelatihan manajemen yaitu berupa seminar di Dinasperindakop dan UMKM. Sebelumnya saya tidak punya catatan tentang keuangan karena saya menganggap kurang begitu penting” (Wawancara dengan I-04 Pada 7 April 2017)

Pelatihan manajemen keuangan sederhana yang di berikan kepada pelaku usaha seperti manajemen kas sederhana dan anggaran kas disusun berdasarkan berupa estimasi penerimaan, meliputi penjualanrunau dan penerimaan sedangkan dalam pengeluaran meliputi pembelian bahan baku, pembayaran upah karyawan, pembayaran pinjaman dan pembayaran lainnya.